

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Analisis Upaya Peningkatan Efektivitas Audit Kepabeanaan dan Cukai Melalui Pendekatan *Slippery Slope Framework*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanaan dan cukai yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai melalui pendekatan *Slippery Slope Framework* dan Model Kontingensi Luder yang diadaptasi oleh Christensen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dilakukan dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang meliputi buku, karya ilmiah, pemberitaan, dan referensi yang relevan lainnya. Data yang digunakan adalah tahun 2014-2016 dimana telah diberlakukan kebijakan sentralisasi audit pada DJBC dan sebelum *piloting* kebijakan *zoning* dalam kegiatan audit kepabeanaan dan cukai di DJBC.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan audit kepabeanaan dan cukai telah terdapat bentuk-bentuk pengendalian yang berkontribusi pada upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanaan dan cukai, seperti adanya pembakuan mekanisme pemilihan objek audit, dan adanya mekanisme monitoring, evaluasi, serta penjaminan kualitas audit. Sedangkan fokus dari kegiatan audit kepabeanaan dan cukai cenderung dititikberatkan pada fungsi penerimaan negara. Pada hasil penelitian ini diketahui bahwa *Audit Coverage Ratio* (ACR) DJBC berada pada kisaran 5% untuk periode tahun 2014-2016. Persentase tersebut cukup kompetitif bila dibandingkan dengan otoritas pabeaan pada kelompok *Lower Middle Income Country* (LMIC) di dunia. Namun demikian persentase tersebut belum memenuhi target capaian ACR DJBC sebesar 10% pada Rencana Strategis DJBC Tahun 2015-2019. Hasil penelitian atas analisis efektivitas pelaksanaan audit kepabeanaan dan cukai didapatkan informasi bahwa unsur-unsur yang menyusun penilaian efektivitas tersebut terdiri dari jumlah penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) dan persentase ACR DJBC setiap tahunnya.

Terhadap kondisi yang mempengaruhi efektivitas audit kepabeanaan dan cukai telah memenuhi beberapa kriteria yang dijelaskan dalam pendekatan konseptual *Slippery Slope Framework*, namun demikian dibutuhkan perhatian terhadap peningkatan ACR DJBC sebagai upaya peningkatan *enforced compliance* serta upaya intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada pengguna layanan dan akuntan publik terkait dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai sebagai upaya peningkatan *voluntary compliance*.

Berdasarkan Model Kontingensi yang diadaptasi oleh Christensen, telah diidentifikasi aktor-aktor serta interaksi yang terjadi diantara aktor-aktor tersebut dalam upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanaan dan cukai. *Promoters of change* yang diidentifikasi adalah Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Penjamin Kualitas Audit, Unit Kerja pada DJBC yang Mempunyai Fungsi Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, serta Akuntan Publik.

Faktor-faktor yang berpotensi mendukung upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanaan dan cukai adalah adanya pembakuan metode pemilihan objek audit atas penerbitan SE-06/BC/2017, adanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi antar unit kerja internal dalam Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai,

tersedianya *database* yang memadai untuk mendukung kegiatan audit kepabeanan dan cukai, tersedianya Auditor Bea dan Cukai yang andal dalam pengidentifikasian pelanggaran *auditee* sebagaimana tercermin pada *Hit Rate* Audit DJBC yang sangat tinggi, terdapatnya upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai melalui mekanisme Kapasitas Standar (Kasta) Auditor dan pemberdayaan pelaksana pemeriksa yang telah tersertifikasi dalam penugasan audit, adanya inisiatif Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna layanan dan akuntan publik terkait kriteria dan ketentuan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta terdapatnya mekanisme monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas audit.

Faktor-faktor yang berpotensi menghambat upaya peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai adalah kurangnya jumlah Auditor Bea dan Cukai dibandingkan dengan populasi objek audit, belum tersedianya perangkat lunak spesifik dalam kegiatan perencanaan audit, kurangnya upaya dalam pengevaluasian kepatuhan objek audit dan upaya untuk memelihara kepatuhan objek audit, serta kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pihak eksternal terkait ketentuan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta kriteria terkait audit kepabeanan dan cukai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai perlu melakukan penambahan jumlah Auditor Bea dan Cukai untuk mengimbangi populasi objek audit yang besar sehingga dapat mengurangi beban LHA yang tertunggak setiap tahunnya serta untuk mencapai ACR DJBC sebesar 10% sesuai dengan Rencana Strategis DJBC 2015-2019. Dibutuhkan pembuatan perangkat lunak yang dapat memudahkan kegiatan perencanaan audit sehingga dapat menghemat *resource* audit dan menghasilkan *output* yang *robust* untuk menunjang kegiatan pelaksanaan audit. Perlunya intensifikasi sosialisasi dan edukasi kepada pengguna layanan dan akuntan publik terkait peraturan kepabeanan dan cukai serta kriteria terkait audit kepabeanan dan cukai untuk membantu mewujudkan *voluntary compliance*. Perlunya perumusan pendekatan rasio ekonomi untuk membantu mengkuantifikasi dampak *output* dari kegiatan audit kepabeanan dan cukai terhadap tingkat kepatuhan objek audit secara relevan dan objektif. Perlunya memasukkan unsur capaian monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas audit ke dalam indeks penyusun Indeks Kinerja Utama Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk melengkapi penilaian atas proses bisnis audit kepabeanan dan cukai yang berpengaruh dalam mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Kepabeanan dan Cukai. Perlunya penerapan *reward* bagi *auditee* yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan konsisten terhadap kepatuhannya sebagai upaya mewujudkan *trust in authority* demi mengimbangi penerapan *power of authority* oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

Kata kunci: Audit Kepabeanan dan Cukai, *Christensen's Contingency Model*, *Enforced Compliance*, *Slippery Slope Framework*, *Voluntary Compliance*

SUMMARY

This research entitled Analysis of the Effectiveness of Customs and Excise Audit Through Slippery Slope Framework Approach. This study aims to provide an overview of efforts to improve the effectiveness of customs and excise audit conducted by the Directorate General of Customs and Excise c.q. Directorate of Customs and Excise Audit through the Slippery Slope Framework approach and Christensen's Contingency Model. This research uses qualitative research method and conducted with descriptive analysis. Data collection is done through interviews, observations, and documentary studies which include books, scientific papers, news and other relevant references. The data used is the year 2014-2016 which at that time has been enforced the centralization of audit at DGCE and prior to the piloting of audit zoning policy at DGCE.

The results of the analysis show that in the implementation of customs and excise audit activities, there are forms of control that contribute in improving the effectiveness of customs and excise audit, such as the existence of standardization of audit object selection mechanism, and the mechanism of monitoring, evaluation, and audit quality assurance. While the focus of customs and excise audit activities tend to be focused on the function of state revenue collector. The Audit Coverage Ratio of DGCE is in the range of 5% for period of year 2014-2016. The percentage is quite competitive when compared with customs authorities in the Lower Middle Income Country (LMIC) group in the world. However, the percentage has not met the target of 10% Audit Coverage Ratio achievement as stated in DGCE Strategic Plan of 2015-2019. The elements that compile the effectiveness assessment consist of the number of completion of Report of Audit Result (Laporan Hasil Audit – LHA) and percentage of Audit Coverage Ratio every year.

The conditions affecting the effectiveness of customs and excise audits have met some of the criteria described in the Slippery Slope Framework conceptual approach. However, attention needs to be made to increase Audit Coverage Ratio as an effort to increase enforced compliance and to intensify socialization and education efforts to service users and public accountants related to the criteria and the provisions of customs and excise laws as a means to increase voluntary compliance.

Based on the Christensen's Contingency Model, the actors as well as the interaction between the actors in an effort to improve the effectiveness of customs and excise audit has been identified. Promoters of change identified are Sub Directorate of Monitoring, Evaluation and Audit Quality Assurance of Directorate of Customs and Excise Audit, as well as Work Units in DGCE with Compliance Guidance and Information Services function, and Public Accountant.

Factors that potentially support the efforts of improving the effectiveness of customs and excise audit are the existence of standardization of audit object selection method as the issuance of SE-06/BC/2017, the existence of integrated Management Information System among internal work units in the Directorate of Customs and Excise Audit, the existence of adequate audit database to support customs and excise audit activities, the availability of a reliable Customs and Excise Auditor in identifying violations of auditee as reflected in the very high Customs

and Excise Audit Hit Rate of DGCE, the existence of effort to optimize the utilization of human resources at Directorate of Customs and Excise Audit through Auditor Capacity Standards mechanism and the empowerment of examiner staff who has been certified to be involved in audit assignment, as well as the initiative of Directorate of Customs and Excise Audit in giving socialization and education to service user and public accountant related about criteria and provisions of customs and excise laws, as well as the existence of mechanism of monitoring, evaluation and audit quality assurance.

Factors that potentially hampering the efforts of improving the effectiveness of customs and excise audits are the lack of Customs and Excise Auditors compared with the audit objects population, the unavailability of software that specifically aimed at optimizing audit planning activities, the lack of effort in evaluating the compliance of audit objects and efforts to maintain the compliance of audit objects, as well as the less intensive implementation of socialization and education to external parties related to the provisions of customs and excise laws and criteria o customs and excise audit.

Based on those results, the Directorate of Customs and Excise Audit needs to increase the number of Customs and Excise Auditor to compensate for the large audit objects population so as to reduce the burden of outstanding Report of Audit Result (LHA) in every year and to achieve the Audit Coverage Ratio of 10% in accordance with the DGCE Strategic Plan of 2015-2019. In addition, spesific software development is required to facilitate audit planning activities so as to save audit resources at the Directorate of Customs and Excise Audit and produce robust outputs to support audit activities. The need for intensification of socialization and education to service users and public accountants related to customs and excise regulations as well as criteria related to customs and excise audits to help realizing voluntary compliance. The need for the formulation of economic ratio approaches to help DGCE in quantifying the outputs impact of customs and excise audit activities on the audit objects. It is also necessary to include the elements of the performance of monitoring, evaluation, and audit quality assurance as one of the performance measurement criteria of the Effectiveness of Customs and Excise Audit Implementation. The need for the application of reward for auditee who have a high level of compliance and have been consistent to keep their compliance as an effort to realize trust in authority to compensate for the application of power of authority conducted by the Directorate of Customs and Excise Audit.

Keywords: Christensen's Contingency Model, Customs Post Clearance Audit, Enforced Compliance, Slippery Slope Framework, Voluntary Compliance